

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi mempunyai istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “organ” yang berarti “alat”. Dalam pengertian umum, organisasi dipahami sebagai bentuk pembagian kerja dan komunikasi kerja antara sekelompok pemegang jabatan yang bekerja sama secara khusus untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu (Armosudiro,2006:12)

Entitas atau Organisasi Nirlaba adalah salah satu organisasi yang dapat dimiliki oleh pemerintah maupun dimiliki sektor swasta, tujuan utama dari organisasi nirlaba ini tidak untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari segala bentuk sumbangan para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan kembali.

Salah satu bentuk akuntabilitas yang sebenarnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki fungsi yaitu memberikan informasi mengenai status keuangan perusahaan atau organisasi, kinerja dan perubahan status keuangan, yang berguna bagi banyak pengguna melalui proses pengambilan/pengambilan keputusan terkait perusahaan. Memiliki laporan keuangan merupakan hal yang penting karena kita dapat mengetahui kondisi bisnis perubahan tersebut, selain itu dapat mengontrol sumber daya keuangan yang dikelola, menghitung jumlah sumber daya, dan

mengetahui seberapa tercapai penggunaan sumber daya tersebut. (Nainggolan, 2012: 3).

Salah satu kategori yang membedakan laporan keuangan organisasinirlaba dengan laporan keuangan pada umumnya yaitu bentuk laporan keuangannya. Banyak yang menganggap bahwa laporan di setiap organisasi baik organisasi nirlaba maupun organisasi laba itu sama saja. Walaupun keduanya berbeda, laporan keuangan organisasi nirlaba juga menyertakan dana atau sumbangan dari semua pihak, dan dana atau sumbangan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pihak internal dan eksternal.. Sedangkan, organisasi laba tidak menerapkan hal seperti itu.

Gereja adalah organisasi nirlaba yang membutuhkan informasi seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, dan lain-lain. Gereja menerima pemasukan dan pengeluaran dari jemaat dan donatur. Karena semua bentuk keuangan di gereja digunakan untuk transaksi, seperti membayar fasilitas tambahan (gedung, tempat parkir, dll), tenaga kerja (satpam, *office boy/girl*, dll.), serta tagihan (listrik, air, telepon, dll), dan hal-hal lain yang berhubungan dengan akuntansi.

Menurut Setiawan (2007) keterbukaan laporan keuangan gereja sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan setiap donatur dan umat yang telah memberikan amalnya kepada gereja untuk mengelola dana tersebut. Dampak suatu penyajian pelaporan keuangan yang tidak faktual dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu hilangnya kepercayaan jemaat gereja tersebut. Hal ini merupakan suatu kerugian terbesar yang dialami

setiap organisasi, baik dalam hal kegiatan di masyarakat maupun proses pertanggungjawaban keuangan ke lembaga.

Segala bentuk keuangan di gereja biasanya hanya dianggap bentuk danasosialdari jemaatnya, sehingga terjadi pembiaran dalam pengelolaannya. Akibat dari pembiaran ini maka seringkali terjadi kehilangan dan kesalahan dalam pencatatan oleh bendahara ataupun bagian keuangan gereja.

Gereja HKBP Jatinegara adalah sebuah organisasi di bidang kerohanian/keagamaan yang tujuannya untuk memberikan pelayanan rohani atau keagamaan kepada masyarakat. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk pengurus gereja (pengurus harian gereja), tetapi juga untuk komunitas jemaat atau gereja sebagai tindakan balasan. Tanggung jawab atas barang yang disumbangkan. Informasi keuangan juga dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan untuk mengelola sumber daya dan dana gereja. Iman, pengharapan dan pekerjaan terpenting dari para pelayan gereja untuk membimbing jemaat mereka untuk bertumbuh adalah untuk bertumbuh menjadi kasih sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Praptomo (2015) mengenai PSAK No.45 di sebuah Gereja GKJW Gresik mengatakan bahwa pada rapat PMHJ yang telah dilakukan oleh pengurus gereja menetapkan kebijakan akuntansi gereja mengikuti pedoman kebijakan akuntansi yang telah dibuat Majelis Agung. Bentuk laporan keuangan GKJW Gresik terdiri dari laporan keuangan harian, laporan keuangan mingguan, dan laporan keuangan tahunan. GKJW Gresik hanya menyusun laporan penerimaan

dan pengeluarannya saja dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini berbanding terbalik dengan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No.45 yang menyebutkan bahwa laporan keuangan harus disusun menjadi 4 bagian yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Rosariana (2018). Ia melakukan penelitian mengenai PSAK No.45 di sebuah Gereja Katolik St. Hubertus Kertosono. Dari hasil penelitian, praktik akuntansi yang diterapkan oleh Gereja Katolik St. Hubertus Kertosono ditentukan melalui rapat Dewan Pastoral Stasi yang sesuai dengan peraturan keuangan Paroki. Laporan yang dibuat oleh Gereja Katolik St. Hubertus Kertosono berupa laporan keuangan bulanan yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk buku kas, sehingga laporan keuangan Gereja Katolik St. Hubertus Kertosono masih belum sesuai dengan PSAK No.45 dalam praktik akuntansinya.

Adapun sumber-sumber keuangan pada Gereja HKBP Jatinegara ialah dari persembahan kebaktian umum (Persembahan kebaktian pertama, persembahan kebaktian kedua, persembahan sekolah minggu), Persembahan kebaktian kategorial (ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemuda), persembahan/perpuluhan/ucap syukur (persembahan mingguan, persembahan tahunan, dan persembahan hari raya seperti jumat agung, paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan natal).

Dana yang masuk ke dalam kas Gereja didapatkan melalui berbagai kontribusi yang diterima dari jemaat gereja tersebut maupun luar jemaat. Dana yang diberikan oleh jemaat maupun luar jemaat dan diterima oleh gereja tidak jelas apakah dana tersebut termasuk sumbangan terikat

atau sumbangan yang tidak terikat. Hal ini terlihat dari nilai sumbangan yang diterima gereja cukup tinggi nilainya, sehingga gereja tidak menggambarkan dengan jelas pengelolaan keuangan nya. Oleh karena itu, gereja harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) No.45 mengenai Pelaporan Keuangan Nirlaba.

Gereja sering menggunakan dana tersebut untuk membayar transportasi kebaktian gereja, biaya listrik, telepon, alat tulis, perlengkapan gereja yang rusak dan perlu diperbaiki, serta untuk membeli perlengkapan penting untuk kebutuhan gereja. Dilihat dari data pendapatan dan pengeluaran gereja, dapat disimpulkan bahwa Gereja HKBP Jatinegara tidak melaksanakan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas. dan catatan atas laporan keuangan. Masih banyak organisasi nirlaba termasuk gereja yang belum memenuhi tanggung jawabnya dengan baik karena sebenarnya cukup sulit, misalnya gereja saat ini menyusun laporan keuangannya hanya berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Gereja yang ada.

Dengan demikian, penyajian laporan keuangan memadai dan sesuai dengan standar PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba adalah bagian yang sangat penting dari organisasi. Standar yang dirancang untuk memberikan kesetaraan dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba, agar mudah dipahami, relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menarik dalam jangka panjang. Melalui penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana gereja HKBP Jatinegara melakukan pendekatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya.

Sebagai pandangan bahwa Gereja HKBP Jatinegara perlu menerapkan standar akuntansi bagi organisasi nirlaba untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi dan transparansi terhadap masyarakat, khususnya para donatur Gereja HKBP Jatinegara. Keunggulan penelitian ini terletak pada tahun PSAK yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan PSAK No. 45 revisi 2011, sedangkan regulasi PSAK No. 45 sebelumnya masih menggunakan PSAK No.45 1997. Penelitian ini menerapkan rekonstruksi untuk memperbaiki laporan keuangan yang digunakan oleh Gereja HKBP Jatinegara. Rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“Rekonstruksi Laporan Keuangan Gereja HKBP Jatinegara Sebagai Salah Satu Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45”**, sehingga judul yang diambil oleh peneliti diharapkan dapat membantu bendahara maupun bagian keuangan Gereja HKBP Jatinegara untuk menyusun laporan keuangan yaitu agar gereja menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.45 dan terbentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi keuangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersedia, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apa kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Gereja HKBP Jatinegara selama ini?
- b. Apakah Kepala gereja dan bendahara gereja telah mengetahui adanya PSAK No.45 sebagai pelaporan keuangan organisasi nirlaba?

- c. Bagaimana penyusunan dan bentuk laporan keuangan Gereja HKBP Jatinegara?
- d. Bagaimana bentuk laporan keuangan gereja yang sesuai dilihat dari PSAK No.45 mengenai penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan akuntansi Gereja HKBP Jatinegara.
- b. Untuk mencari tahu apakah pengurus gereja mengetahui adanya dan pentingnya PSAK No.45 sebagai laporan keuangan organisasi nirlaba
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk laporan keuangan dan metode laporan keuangan yang disusun oleh Gereja HKBP Jatinegara
- d. Untuk mengetahui bagaimana bentuk laporan yang tepat menurut PSAK No.45

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai rekonstruksi laporan keuangan yang diperoleh selama masa pendidikan perguruan tinggi.

2. Bagi Gereja

Dalam hal ini Gereja HKBP Jatinegara dapat memahami standar pelaporan keuangan yang diterima dan membantu gereja dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sesuai PSAK No. 45 untuk mendorong perkembangan gereja.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian mengenai laporan keuangan pada organisasi nirlaba menurut PSAK No.45 ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan menggunakannya.

4. Bagi Pihak Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan referensi lain untuk rekonstruksi laporan keuangan.

